

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DALAM SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL (UPAYA MENERTIBKAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI WILAYAH KOTA BANJAR)

Puji Hamdani¹, Eet Saeful Hidayat², Ahmad Juliarso³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: pujihamdani12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjar dalam menyelesaikan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga peran dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih sangat minim dan terbatas, rendahnya responsivitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan buku-buku literatur. Teknik analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2 dimensi dan 9 indikator yang dijadikan tolak ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan optimal dan 6 indikator lainnya belum sesuai dalam pelaksanaannya. Hambatan yang terjadi karena komunikasi dan koordinasi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal antara kedua belah pihak. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan terus menerus serta dilaksanakannya rapat koordinasi dalam rangka penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar antar stakeholder terkait.

Kata Kunci : *Komunikasi, Koordinasi, Sinergitas.*

PENDAHULUAN

Kota Banjar yang menjadi salah satu kota terkecil di Jawa Barat masih memiliki berbagai persoalan yang perlu untuk segera diselesaikan ataupun ditindak lanjuti. Salah satunya yaitu maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah di Kota Banjar. Selama tahun 2022 sebanyak 19 kasus orang dalam gangguan jiwa, 28 kasus anak jalanan dan 2 kasus orang terlantar yang ditertibkan. Sementara itu pada tahun 2023 terdata sebanyak 13 kasus penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Penyandang masalah kesejahteraan sosial ini sering ditemukan di beberapa wilayah di Kota Banjar, seperti di persimpangan lampu merah taman kota, persimpangan soponyono, persimpangan terminal dan di sekitar alun-alun Kota Banjar. Maka dari itu, perlunya sinergitas antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam upaya menertibkan penyandang masalah kesejahteraan Sosial. Mengingat Dinas Sosial merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk mengurus pada bidang sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan

ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.

Dengan bersinergi, maka dapat tercipta paradigma dan kolaborasi (pola pikir) yang saling bertukar gagasan sehingga dapat terciptanya suatu keluaran yang lebih baik dan tentunya lebih efektif, mengingat suatu kegiatan yang dilaksanakan memiliki tujuan bersama menuju pada *output* yang positif (Mastufah, S., Marliani, L., & Hidayat, E. S, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya peran yang saling bersinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kota Banjar ditemukan permasalahan mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar yang belum optimal. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Lemahnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjar dalam menyelesaikan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga peran dan

keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih sangat minim dan terbatas.

Contoh : Dalam proses penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial sering kali tidak di dampingi oleh pihak Dinas Sosial.

2. Rendahnya responsivitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Contoh : Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial akan bertindak apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat serta patroli wilayah yang tidak menentu mengakibatkan banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Contoh : Jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Bidang Tibumtranmas yang melakukan penertiban penyandang

masalah kesejahteraan sosial sangat terbatas. Jumlah personil yang turun ke lapangan dalam rangka penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya 6 orang, sedangkan idealnya jumlah personil yang harus turun ke lapangan berjumlah 12 orang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “**Bagaimana Komunikasi dan Koordinasi dalam Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial** (Upaya Menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kota Banjar)?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar. Menurut Sugiyono (2019:18) mengemukakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, (eksperimen adalah sebagai lawannya) instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi (gabungan),

sifat dari analisis data yaitu induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan di bagian maknanya dari pada bagian generalisasi”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian berjumlah 6 orang diantaranya Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Tibumtrnemas, Kepala UPTD Rumah Perlindungan Sosial, Kepala Seksi Opdal dan Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana sinergitas yang terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar, penulis melaksanakan penelitian melalui wawancara dan observasi secara langsung ke lapangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengacu pada teori Rahmat dan Najiyati dalam Mawar (2011:102-103) yang menjelaskan bahwa indikator

atau parameter utama bagi suatu sistem yang saling bersinergi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Komunikasi
2. Koordinasi

Dimensi-dimensi di atas dapat diuraikan kedalam indicator - indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

a. Adanya pertukaran informasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam rangka penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti pada indikator adanya pertukaran informasi yang jelas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam rangka penertiban PMKS dikatakan cukup optimal, akan tetapi belum maksimal dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa komunikasi yang dilaksanakan belum optimal, penyebaran serta pertukaran informasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan terkadang sering terjadinya miskomunikasi antara kedua belah pihak dalam hal ini antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial.

Hambatan yang kerap terjadi saat ini karena adanya miskomunikasi antar dinas sehingga informasi penting tidak dapat tersampaikan dengan baik. Penyebaran informasi antar lembaga

hanya sebatas memberi tahu keberadaan PMKS saja. Padahal komunikasi sangat penting dalam sebuah koordinasi untuk membentuk kerja sama tim. Menegaskan kembali hambatan yang terjadi dalam komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial bahwa komunikasi sendiri belum dilaksanakan secara optimal antar lembaga yang terlibat, sehingga penyebaran dan pertukaran informasi antar lembaga cukup lemah.

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memperkuat komunikasi antara pihak Satpol PP dengan Dinas Sosial, misalnya saja dengan mengadakan pertemuan rutin baik secara formal maupun secara tidak formal hal ini untuk membangun *chemistry* antar individu dan pegawai antar lembaga, membuat saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Saluran komunikasi ini harus mudah diakses dan dapat diandalkan, seperti melalui surat, email, telepon maupun pesan singkat. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dengan membuat forum komunikasi yang rutin antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Forum ini dapat berupa pertemuan rutin atau rapat koordinasi yang diadakan secara teratur untuk membahas isu-isu terkait masalah kesejahteraan sosial dan penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar.

Ivancevich (2007:56), menyatakan bahwa komunikasi adalah transisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol bersama dari satu orang atau kelompok kepada pihak lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu kegiatan untuk membentuk persamaan antara si pemberi pesan dan si penerima pesan dalam menyampaikan informasi, ide, pengetahuan, sikap dan tingkah laku.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan pada teori di atas, diketahui bahwa pertukaran informasi dalam rangka penertiban PMKS yang mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Banjar belum dapat dikatakan optimal.

b. Terjalannya komunikasi dua arah (saling berinteraksi) antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam merencanakan penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator terjalannya komunikasi dua arah (saling berinteraksi) antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam merencanakan penertiban PMKS dapat dikatakan belum optimal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa komunikasi yang

dilaksanakan belum optimal, penyebaran serta pertukaran informasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kesigapan dari pihak Dinas Sosial dalam menangani kasus penertiban PMKS serta sistem pembagian kerja yang belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi saat ini yaitu kedua belah pihak belum sepenuhnya saling bertukar informasi dalam pelaksanaan tugas penertiban PMKS ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pembagian kerja yang belum optimal karena masih adanya saling lempar tugas dalam penanganan PMKS sehingga dapat menyebabkan tidak ada kejelasan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terkait masalah rehabilitasi, apakah PMKS ataupun ODGJ disembuhkan oleh Dinas Kesehatan atau dikirim langsung ke tempat panti sosial oleh Dinas Sosial. Namun dapat dilihat bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab atas pengupayaan panti sosial atau rehabilitasi sosial, Satpol PP hanya membantu dalam hal penertiban dan Dinas Kesehatan hanya memeriksa kesehatan PMKS tersebut. Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa sejauh ini dalam rangka penertiban PMKS di lapangan yang bergerak hanya dari pihak Satpol PP saja, keterlibatan instansi terkait

seperti Dinas Sosial yang seharusnya ikut mendampingi dan dari Dinas Kesehatan juga belum adanya keterlibatan dalam pelaksanaannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara berkomunikasi dengan jelas dan efektif agar penerima pesan (komunikatif) dapat memahami dengan baik terhadap pesan yang disampaikan oleh penyampai informasi (komunikator). selain itu faktor lain juga sangat penting seperti memperkuat kerja sama dan kolaborasi sehingga tugas penanganan penertiban PMKS ini dapat berjalan dengan lancar.

c. Adanya umpan balik (*feedback*) yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator adanya umpan balik (*feedback*) yang positif dalam rangka penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar dapat dikatakan sudah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa adanya umpan balik (*feedback*) yang positif dalam rangka penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar sudah berjalan dengan maksimal. Para petugas pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan ketika adanya laporan pengaduan dari masyarakat maka pihak Satpol PP

akan segera melaksanakan penertiban PMKS agar terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Banjar.

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pihak Satpol PP selalu siap apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan PMKS yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk merespon laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan PMKS yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum pihak dari Satpol PP selalu siap dan sigap dengan cara mempersiapkan personil yang biasanya berjumlah 8 orang untuk menertibkan PMKS utamanya PMKS yang meresahkan masyarakat.

Hambatan yang memang pernah terjadi selama ini dalam penertiban PMKS yang meresahkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu dikarenakan kurangnya personil yang turun ke lapangan untuk menertibkan PMKS.

Guna mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memaksimalkan peran tiap anggota serta membuat tim unit reaksi cepat yang secara khusus menangani dan menertibkan PMKS yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Banjar.

d. Adanya kesamaan persepsi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam melaksanakan penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator Adanya kesamaan persepsi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam melaksanakan penertiban PMKS belum optimal karena kurangnya konsep kesatuan tindakan yang dilakukan antar lembaga terkait dalam rangka penanganan dan penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa *stakeholder* terkait belum dapat bekerja sama dengan baik. Untuk menyamakan persepsi tentunya perlu dilakukan kerja sama yang harmonis antara kedua belah pihak dalam rangka penertiban PMKS. Kerjasama yang lebih erat, tingkatkan sinergitas yang baik serta perlunya kesadaran tiap individu untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Hambatan yang terjadi dalam menyamakan persepsi sehingga penyelenggaraan penertiban PMKS dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya konsep kesatuan tindakan yang dilakukan antar lembaga terkait dalam rangka penanganan dan penertiban PMKS, kurangnya sistem kerja sama yang

baik antara Dinas Sosial dan Satpol PP, terkadang dari Pihak Dinas Sosial hanya ikut membenarkan dan mempercayai saja kepada Pihak Satpol PP serta tidak adanya koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar.

2. Koordinasi

- a. Terjadinya komunikasi yang seimbang antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam rangka menertibkan PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator terjadinya komunikasi yang seimbang antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam rangka menertibkan PMKS dapat dikatakan belum optimal karena komunikasi yang terjadi kurang insentif sehingga terkadang menimbulkan sedikit miskomunikasi antar kedua belah pihak. Tentunya hal ini harus segera diperbaiki mengingat komunikasi ini merupakan unsur utama dalam proses pelaksanaan tugas apalagi tugas yang bersifat kolaborasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa komunikasi yang dilaksanakan belum optimal, pertukaran informasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, interaksi antara stakeholder terkait masih lemah dan terkadang sering terjadinya miskomunikasi antara

kedua belah pihak dalam hal ini antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial.

Hambatan yang terjadi saat ini dapat disebabkan karena insentifitas komunikasi yang dilaksanakan belum optimal sehingga dapat menimbulkan terjadinya miskomunikasi. Tidak akan ada kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat apabila komunikasi yang dilakukan saja tidak optimal. Kesatuan tindakan akan muncul karena antar lembaga terkait melakukan komunikasi yang insentif sehingga adanya kesepakatan bersama bagaimana seharusnya penanganan PMKS di Kota Banjar yang baik untuk dilaksanakan.

Tentunya hambatan ini dapat diatasi dengan cara melakukan komunikasi yang insentif dan tentunya dapat dipahami oleh setiap individu antar pegawai.

- b. Terciptanya kesadaran yang merata akan pentingnya koordinasi dalam rangka penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator terciptanya kesadaran yang merata akan pentingnya koordinasi dalam rangka penertiban PMKS belum terlaksana dengan baik. Karena seperti belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat, komunikasi yang dilakukan antar lembaga tidak insentif juga masih

adanya saling lempar tanggung jawab dalam hal penanganan PMKS. Pada prinsipnya, ketika komunikasi dapat dijalankan dengan baik maka koordinasi juga dapat diterapkan dengan maksimal. Kurangnya komunikasi yang baik sehingga koordinasi tidak dapat dijalankan dengan baik merupakan hambatan yang terjadi saat ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa koordinasi yang dilaksanakan antara Satpol PP dan Dinas Sosial belum dapat dikatakan optimal, hal tersebut dikarenakan tidak adanya rapat koordinasi yang secara khusus membahas perencanaan penertiban PMKS antara Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Hambatan yang terjadi saat ini disebabkan karena insentifitas komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial belum dilaksanakan dengan optimal yang mengakibatkan kurangnya koordinasi yang dilakukan.

Hambatan ini tentunya dapat diatasi dengan cara mengadakan pertemuan rutin atau rapat koordinasi antar *stakeholder* terkait untuk membahas agenda dan jadwal penertiban PMKS. Sehingga ketika penertiban di lapangan, ada pendampingan dari pihak Dinas Sosial utamanya serta dari pihak terkait seperti dari Dinas Kesehatan agar

penertiban PMKS dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan himpunan data yang diperoleh di lapangan bahwa untuk menciptakan kesadaran yang merata akan pentingnya koordinasi dalam rangka penertiban PMKS bahwa setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi dan *stakeholder* terkait yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh pimpinan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.

c. Adanya petugas pelaksana yang berkompeten dalam melaksanakan penertiban PMKS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator adanya petugas pelaksana yang berkompeten dalam melaksanakan penertiban PMKS dapat dikatakan dapat berjalan dengan optimal. Rata-rata informan menjelaskan bahwa setiap individu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan maksimal, hal ini disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. hal ini berarti disiplin kerja dapat diterapkan dengan maksimal.

Hambatan yang pernah terjadi karena memang di setiap tahunnya sering terjadi rotasi mutasi antar dinas di lingkup pemerintah Kota Banjar. Maka dari itu tiap pegawai harus dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya serta menerapkannya dengan maksimal.

Sebagaimana pendapat Hasibuan dalam Sinambela (2016:335) bahwa “disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dapat melaksanakan pekerjaannya dengan optimal.

d. Adanya kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi yang jelas dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada indikator adanya kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi

yang jelas dan terukur dapat dikatakan belum optimal karena belum terjadi kesepakatan atas hasil koordinasi dalam rangka penertiban PMKS. Harapan untuk kedepannya stakeholder terkait bisa saling bersilaturahmi dan berkoordinasi guna mengatasi permasalahan PMKS yang ada saat ini. Kurangnya kesadaran tiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya merupakan hambatan saat ini.

Hambatan saat ini yaitu dikarenakan tidak adanya rapat/pertemuan rutin antara kedua belah pihak dalam rangka merencanakan penertiban PMKS yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di sekitar wilayah Kota Banjar.

Hambatan tersebut tentunya dapat diatasi dengan cara mengadakan pertemuan rutin/rakor baik dilakukan secara formal maupun secara informal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesepakatan, komitmen dan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam rangka menertibkan PMKS di wilayah Kota Banjar belum dilaksanakan dengan optimal.

e. Tersusunnya jadwal dan rencana kegiatan dalam penertiban PMKS secara kontinyu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada

indikator tersusunnya jadwal dan rencana kegiatan dalam penertiban PMKS secara kontinyu sudah diterapkan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap informan yang menegaskan bahwa untuk periode tahun 2024 dari pihak Satpol PP sendiri terutama dari bidang Tibumtrnmas sudah menyusun kegiatan dan rencana penertiban PMKS. Dimana untuk tiap harinya ada personil/anggota yang diturunkan ke lapangan, ada yang patroli *stand by* di setiap perempatan ada juga anggota yang dipersiapkan untuk melaksanakan patroli wilayah. Para PMKS biasanya melaksanakan aksi meminta-minta di kawasan perempatan lampu merah di wilayah yang ramai, yakni sekitar kawasan taman kota, terminal, alun-alun dan sekitar perempatan soponyono. Karena keterbatasan anggota, pihak Satpol PP selalu memaksimalkan tiap orangnya untuk bisa ikut andil dalam rangka pelaksanaan patroli rutin dan penertiban PMKS di lingkup kerja Satpol PP Kota Banjar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa rencana serta jadwal kegiatan penertiban PMKS oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah tersusun untuk periode tahun 2024. Hal tersebut guna mengatasi gangguan K3 serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Banjar.

Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP yaitu terkadang kekurangan personil/anggota yang turun ke lapangan untuk melaksanakan penertiban PMKS yang mengganggu kamtibmas di sekitar wilayah Kota Banjar.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan dibuatnya tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang secara khusus menangani dan melaksanakan penertiban PMKS. Sejalan dengan pendapat Robbins & Judge (2017:89) mengungkapkan bahwa kerja tim adalah sebuah kelompok yang secara individu memiliki upaya yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input yang dilakukan secara individu. Hal itu disimpulkan bahwa kerja tim akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pada kinerja individu pada suatu organisasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jadwal dan rencana kegiatan penertiban PMKS sudah dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan di wilayah Kota Banjar, diketahui belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Dapat dilihat dari 2 dimensi dan 9 indikator yang dijadikan alat ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan optimal sedangkan 6 indikator lainnya belum sesuai dengan pelaksanaannya. Adapun 3 indikator yang

sudah berjalan dengan optimal tersebut yaitu adanya umpan balik (*feedback*) yang positif, adanya petugas pelaksana yang kompeten serta tersusunnya jadwal dan rencana kegiatan penertiban PMKS. Sedangkan 6 indikator yang belum berjalan dengan optimal yaitu belum adanya pertukaran informasi yang jelas, belum terjalannya komunikasi dua arah (saling berinteraksi), tidak adanya kesamaan persepsi, komunikasi yang belum seimbang serta tidak adanya kesepakatan atau koordinasi bersama dalam rangka penertiban PMKS.

Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya komunikasi yang intensif antara kedua instansi sehingga menimbulkan miskomunikasi, sering terjadinya lempar tugas dan tanggung jawab (terjebak akan egosentrisme), tidak adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan antar *stakeholder* terkait serta kurangnya personil yang turun ke lapangan dalam rangka penertiban PMKS.

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi yang baik dan terus menerus, bisa dilakukan dengan cara membuat forum komunikasi yang rutin antara Satpol PP dan Dinas Sosial, forum tersebut dapat berupa pertemuan rutin atau rapat koordinasi yang dilaksanakan secara teratur untuk membahas isu-isu terkait masalah kesejahteraan sosial, membuat saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara Satpol PP dan Dinas Sosial seperti melalui surat, email telepon/pesan singkat serta membuat daftar kontak untuk memudahkan komunikasi serta

membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan penertiban PMKS.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Covey, S. R. 1989. *The Seven Habits Of Highly Effective People*. Simon and Schuster. New York.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Effendy, Uchjana Onong. 2005. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Eko Widodo, Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Inu Kencana, Syafiie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ivancevich, J.M. 2007. *Human Resource Management*. Singapore. Mc Graw Hill.
- Kusnadi, Agoes, Candra. 2005. *Teori dan Manajemen Stress*. Malang : Taroda.

- L. Tubbs, Sylvia Moss. 2005. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, Anwar. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Pemuda Rosdakarya.
- Mastufah, S., Marliani, L., & Hidayat, E. S. (2022). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang.
- Maulidia, Rohman dkk. 2022. *Transformasi dan Sinergi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Q-Media.
- Mawar, Dkk. 2020. *Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : UM Jakarta Press.
- Moekijat. 2000. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.